KRISIS PANGAN MASYARAKAT INDONESIA DIBAWAH PEMERINTAHAN PRESIDEN SUKARNO ERA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)

Muhamad Rasid[1], Etmi Hardi[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]muhamadrasid237@gmail.com, [2]etmihardi@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji krisis pangan yang terjadi di Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk, dinamika, dan respon pemerintah Sukarno. Permasalahan yang diangkat meliputi penyebab terjadinya krisis pangan, dampaknya terhadap masyarakat, serta potret kehidupan masyarakat selama periode tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam situasi krisis pangan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan analisis surat kabar dan arsip dari periode 1959 hingga 1965, serta sumber sekunder seperti buku, laporan penelitian, dan artikel terkait. Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan data melalui heuristik, kritik dan verifikasi, interpretasi melalui analisis dan sintesis dan penulisan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis pangan dipicu oleh ketidakstabilan politik, ketimpangan produksi, pertumbuhan penduduk yang pesat, bencana alam dan masalah distribusi beras yang kacau akibat penyewengan oleh beberapa pihak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa krisis pangan memperlemah rezim Sukarno dan memicu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut melalui kecaman tindakan pencolengan serta melakukan anjuran diversifikasi dalam konsumsi pangan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap masalah pangan di Indonesia, yang harus menjadi fokus bagi pemerintah dan masyarakat di masa depan.

Kata Kunci : *Krisis Pangan, Demokrasi Terpimpin, Sukarno, Indonesia, Sejarah Sosial*

ABSTRACT

This study examines the food crisis that occurred in Indonesia during the Guided Democracy era (1959-1965), focusing on the causes, forms, dynamics, and responses of the Sukarno government. The issues raised include the causes of the food crisis, its impact on society, and a portrait of community life during that period. The purpose of this study is to understand in depth the food crisis situation and the steps taken by the government to deal with it. The method used is library research with analysis of newspapers and archives from the period 1959 to 1965, as well as secondary sources such as books, research reports, and related articles. The research steps include data collection through heuristics, criticism and verification, interpretation through analysis and synthesis, and historical writing. The results show that the food crisis was triggered by political instability, production inequality, rapid population growth, natural disasters, and chaotic rice distribution problems due to misappropriation by several parties. The conclusion of this study confirms that the food crisis weakened the Sukarno regime and triggered government efforts to address the problem by condemning acts of embezzlement and encouraging diversification in food consumption. The implications of this research indicate the importance of continued attention to food issues in Indonesia, which should be a focus for the government and society in the future.

Keywords : *Food Crisis, Guided Democracy, Sukarno, Indonesia, Social History*

PENDAHULUAN

Masalah pangan telah menjadi isu krusial dan berkelanjutan dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar manusia, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi politik dan stabilitas nasional. Fakta bahwa belakangan bahwa harga beras—sebagai komoditas utama pangan—selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (BPS, 2025) menunjukkan bahwa krisis pangan bukan hanya ancaman masa lalu, melainkan persoalan yang terus menghantui hingga kini. Relevansi isu ini semakin nyata ketika pemerintah saat ini mengusulkan program Makan Bergizi Gratis sebagai respons terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, perhatian pemerintah terhadap masalah pangan sebenarnya telah muncul sejak masa kepemimpinan Presiden Sukarno, yang menegaskan bahwa urusan "persediaan makan rakyat" adalah soal mati-hidup bangsa (Pidato Sukarno, 1952).

Peneliti membahas persoalan ini dengan menelusuri bagaimana krisis pangan berdampak terhadap masyarakat Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Fokus diberikan pada aspek sosial dari krisis tersebut, bukan hanya sebagai akibat dari kegagalan kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menggambarkan kesulitan hidup masyarakat luas. Pendekatan ini diambil karena sebagian besar penelitian terdahulu cenderung melihat masalah pangan dari sudut pandang kebijakan atau struktural negara, dan belum banyak yang menggali bagaimana krisis tersebut dialami dan direspons oleh masyarakat bawah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan pokok: (1) Apa penyebab utama terjadinya krisis pangan pada masa Demokrasi Terpimpin? (2) Bagaimana bentuk dan dinamika krisis tersebut dalam kehidupan masyarakat? (3) Seperti apa potret keseharian masyarakat yang terdampak oleh krisis pangan pada masa akhir pemerintahan Sukarno? Pertanyaan ini penting untuk dijawab demi memahami keterkaitan antara kebijakan politik, ekonomi, dan dampaknya terhadap masyarakat sipil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman historis yang komprehensif mengenai krisis pangan pada masa Demokrasi Terpimpin, dengan menitikberatkan pada narasi sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan secara deskriptif faktor penyebab krisis, bentuk-bentuk manifestasinya dalam kehidupan sosial, serta kebijakan pemerintah yang diambil untuk menanggapi krisis tersebut. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sejarah sosial Indonesia, terutama pada periode yang selama ini lebih dikenal dalam studi sejarah politik.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Wijayanti N. (2019) dengan judul "Kebijakan pangan Sukarno dari tahun 1950 hingga 1965", namun belum menyentuh aspek keseharian masyarakat atau dampak sosial krisis pangan secara mendalam. Kedua, Penelitian Nawiyanto (2017) dengan judul "*The Politics of Food and Food Security during Indonesia's Old Order (1945-1965)*" lebih menekankan pada strategi pemerintah dan efisiensi kebijakan pangan. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Wahyu Nurhidayat dkk. (2024) yang berjudul "*Krisis Ekonomi Dan Kondisi Masyarakat Indonesia Tahun 1965- 1966*" yang membahas mengenai masa genting saat terjadinya krisis yaitu tahun 1965-1966 dari berbagai sudut pandang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Hasil penelitian ini menemukan penyebab utama krisis, termasuk korupsi yang meluas, serta kebijakan ekonomi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Dalam analisa penulis terdapat kesenjangan yang membuka ruang bagi kajian dengan perspektif sejarah sosial, yang mengangkat suara masyarakat sebagai pelaku dan korban dari krisis tersebut. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan Sartono Kartodirdjo bahwa sejarah

semestinya digambarkan "dari bawah", yaitu melalui pengalaman masyarakat biasa dalam menghadapi perubahan struktural (Kartodirdjo, 1984).

Dalam konteks teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep krisis pangan sebagaimana dirumuskan oleh FAO, yaitu sebagai situasi ketika ketersediaan pangan tidak mencukupi secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk (FAO, 2022). Selain itu, teori kebijakan publik oleh Anderson digunakan untuk memahami hubungan antara kebijakan ekonomi-politik dengan kondisi sosial masyarakat. Demokrasi Terpimpin sendiri dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberi kontrol penuh pada Presiden Sukarno, termasuk dalam hal kebijakan pangan dan ekonomi (Ricklefs, 2003).

Fokus utama dari artikel ini adalah menganalisis secara historis dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia selama masa krisis pangan di bawah rezim Sukarno. Pencarian data dilakukan melalui surat kabar era 1960-an, arsip nasional, dan dokumen resmi pemerintah, disandingkan dengan literatur sekunder dari studi terdahulu. Dengan pendekatan sejarah sosial, artikel ini berharap dapat merekam dengan jujur dan kritis kondisi masyarakat dalam menghadapi kelangkaan pangan, melonjaknya harga beras, hingga munculnya protes masyarakat yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu runtuhnya kekuasaan Sukarno.

Penelitian ini tidak hanya penting untuk menjawab pertanyaan historis, tetapi juga relevan dalam memberikan refleksi bagi kebijakan pangan masa kini. Krisis pangan di era Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola ekonomi dan dominasi kepentingan politik dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, memahami krisis ini melalui lensa sejarah sosial akan memperkaya perspektif kita dalam menanggapi permasalahan ketahanan pangan di masa depan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah *(Historical Research Method)* dan tergolong pada penelitian kualitatif. Adapun tahapan dalam penelitian sejarah heuristik, kritik dan verifikasi sumber sejarah, interpretasi (analisis dan sintesis sumber sejarah) dan historiografi dengan melakukan penyusunan serta penulisan fakta sejarah yang relevan dengan permasalahan dan konsep/teori yang digunakan (Kuntowijoyo, 1995). Pada tahap Heuristik, peneliti melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan terkait pengumpulan dan pengolahan data meliputi studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang digunakan terdapat sumber primer dan sekunder. Sumber primer penulis banyak bersandar pada surat kabar yang diterbitkan pada periode tersebut seperti surat kabar *Harian Merdeka*, *Bintang Timur*, *Berita Indonesia*, *Berita Yudha*, *Kedaulatan Rakjat*, serta beberapa surat kabar asing seperti dari Belanda. Kemudian ditambah dengan beberapa data dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Arsip Departemen Penerangan RI wilayah Jakarta dari tahun 1959 hingga 1965, Arsip Kementerian Pertanian RI, Arsip Sekretariat Negara RI 1959 hingga 1968 dan lainnya, data statistik periode tersebut yaitu *Statistical Of Pocketbook* (BPS) serta luaran lain tentang respon kebijakan pangan oleh pemerintah yang dilakukan era tersebut seperti proyek *kookboek* nasional yaitu Mustikarasa serta produk hukum yang dikeluarkan. Kemudian terdapat sumber sekunder lain yang relevan dengan tema penelitian seperti berupa buku, laporan penelitian terdahulu, jurnal penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut.

Pada tahap kritik dan interpretasi penulis melakukan kritik ekstern dan intern guna menguji otentisitas atau keaslian sumber dengan melakukan perbandingan sumber dengan sumber yang lain. Selanjutnya tahap interpretasi melalui analisis dan sintesis. Dan tahapan terakhir melakukan penulisan sejarah berdasarkan data yang sebelumnya diteliti secara sistematis dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Situasi Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Lahirnya sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 merupakan respon Presiden Sukarno terhadap instabilitas nasional pasca kegagalan sistem Demokrasi Parlementer. Gagalnya sistem ini, menurut Sukarno, karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan revolusioner yang menyatakan bahwa "revolusi belum selesai" (Rabani et al., 2013: 259). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Sukarno memantapkan kekuasaannya dengan membentuk Kabinet Kerja dan institusi seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) serta MPRS sebagai instrumen baru dalam sistem pemerintahan (Noer, 1990: 488–489).

Struktur kekuasaan dalam era Demokrasi Terpimpin dijelaskan oleh pertarungan kekuatan antara Presiden Sukarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat (AD). Ketiganya membentuk apa yang disebut para sejarawan sebagai "segitiga kekuasaan" (Abdulah et al., 2012: 17). Ketegangan ini semakin terlihat ketika militer menegaskan peran politiknya melalui Peristiwa 17 Oktober 1952 dan ditetapkannya Undang-Undang Darurat Perang pada tahun 1957 atas desakan Jenderal Nasution. Peran tentara yang semakin dominan bahkan diabadikan dengan menyebut diri mereka sebagai "anak kandung revolusi" (Rabani et al., 2013: 260).

Kondisi politik luar negeri yang memanas, terutama dalam kasus Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia, memperluas peran militer sekaligus membuka ruang manuver bagi PKI. Setelah kekalahan Indonesia dalam perundingan PBB atas Irian Barat (1957), PKI dan tentara sama-sama mengambil peran penting dalam aksi nasionalisasi perusahaan asing (Rizaldi et al., 2023: 2856). Puncaknya, konfrontasi dengan Malaysia mendorong Indonesia keluar dari PBB dan memperparah isolasi ekonomi nasional (Rickleffs, 2004: 536). Dalam konteks ini, PKI yang dekat dengan Blok Timur yaitu Cina dan Angkatan Darat yang condong ke Blok Barat yakni Amerika Serikat menjadikan konflik internal semakin sarat dengan nuansa Perang Dingin.

Dari segi ekonomi, Sukarno mencetuskan sistem "ekonomi terpimpin". Sistem ekonomi terpimpin digunakan untuk mewujudkan sebuah tujuan "pola pembangunan sosialis" yang disebutnya sebagai "sosialisme ala Indonesia" (Thee Kian Wie, 2012: 252). Namun, dalam pelaksanaannya, perekonomian justru berada dalam kondisi krisis. Sebelum melahirkan konsepsi itu, inflasi membuat harga-harga menjadi sangat tinggi. Ini terlihat dalam indeks biaya hidup mencapai lebih dari 100% antara 1950–1957 (Rickleffs, 2004: 475), dan terus meningkat tajam hingga mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan mencetak uang sebesar 300% dan meroketnya kurs pasar gelap hingga Rp 50.000 per dolar AS (Hill, 1996: 192; Rickleffs, 2004: 552). Kebijakan devaluasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 pun tidak efektif dan justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah.

Dalam situasi ini, pengeluaran negara juga tidak dapat ditekan. Proyek-proyek mercusuar yang dicanangkan Sukarno seperti pembangunan Monas, Hotel Indonesia, dan stadion olahraga

GBK terus berlanjut, menyedot anggaran besar negara (Merdeka, 31 Januari 1961; Pusponegoro & Notosusanto, 2008: 430–432).



Gambar 1. Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, Istora Senayan dan lainnya

Nasionalisasi perusahaan Belanda juga menimbulkan masalah baru karena kekurangan tenaga ahli dan maraknya korupsi membuat perusahaan yang diambil alih tidak mampu menjalankan fungsinya (Rickleffs, 2004: 517). Selanjutnya hal yang membuat situasi semakin kisruh adalah diskriminasi ekonomi terhadap warga keturunan Tionghoa dan penutupan toko-toko mereka oleh tentara (Rickleffs, 2004: 528) menambah panjang daftar faktor yang memungkinkan terjadinya gejolak ekonomi, mengingat peranan mereka sangat besar dalam jalannya roda perekonomian. Rantai pasokan pangan beras adalah sebagian besar berada di tangan pengusaha etnis Tionghoa Sehingga berdampak terhadap distribusi barang kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut membawa dampak langsung terhadap masalah pangan nasional khususnya bagi masyarakat. Program-program seperti swasembada pangan, yang pernah dijanjikan sejak tahun 1952 melalui Program Kemakmuran Istimewa, gagal karena tidak konsisten dalam pelaksanaannya serta terhambatnya kekacauan politik dan militer (Rakhman & Hidayat, 2022: 8). Laju pertumbuhan sektor pertanian bahkan hanya 1,2–1,4% per tahun pada periode 1960–1965, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0–2,2% per tahun (Pusponegoro & Notosusanto, 2008: 432). Hal ini memperjelas bahwa krisis pangan bukan hanya akibat ekonomi makro, melainkan hasil dari kegagalan negara dalam mengelola urusan pangan secara konsisten di tengah ketegangan politik dan internasional yang terus membesar.

B. Faktor Lain Terjadinya krisis Pangan Tahun 1959 Hingga 1965

Situasi politik yang masih mengalami ketidakstabilan membuat aspek ekonomi juga mengalami dampaknya. Indonesia sebelum tahun 1959, atau semenjak 1950 belum sepenuhnya merdeka secara ekonomi (Thee Kian Wie: 2005). Inflasi yang meledak di tahun 1956 dan 1957 (Zed, M., & Amri, E: 1994) memang menjadi persoalan yang membuat kondisi harga-harga bahan pokok menjadi naik memasuki era Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi ditinjau dari aspek lain ada beberapa hal lain yang membuat situasi pemenuhan pangan menjadi makin terancam yaitu petumbuhan penduduk, masalah produksi dan distribusi pangan serta bencana alam.

1. Pertumbuhan Penduduk (Sejarah Demografis)

Semenjak tahum 1950, Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Awal tahun 1950-an, diantara negara lain di dunia pada tahun yang sama, Indonesia menjadi negara dengan urutan ketujuh dengan jumlah penduduk terbanyak (Wilson R. &Omas B.S: 2015).

Tabel 1. Jumlah Populasi Penduduk Indonesia

Tahun	Jawa dan Madura (juta jiwa)	Luar Jawa (juta jiwa)	Total (juta jiwa)
1950	50,4	26,7	77,2
1951	51,4	27,3	78,7
1952	52,4	27,8	80,3
1953	53,4	28,4	81,9
1954	54,5	29,1	83,6
1955	55,6	29,7	88,4
1956	56,8	30,4	87,2
1957	88	31,1	89,1
1958	59,2	31,8	91,1
1959	60,5	32,5	93,1
1960	61,9	33,3	95,2

Angka pertumbuhan dipengaruhi oleh angka kelahiran yang juga meningkat, tahun berikutnya yaitu dari tahun 1961 hingga 1965 pertumbuhan penduduk juga semakin betumbuh. (SoP, 1964-67). Jika ditarik dengan data sensus di zaman Kolonial Belanda di tahun 1930, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Di tahun 1930, jumlah penduduk Indonesia atau Hindia Belanda diperkirakan sebanyak 60,7 juta jiwa. Sementara ditahun 1961 tersebut jumlahnya meningkat sebesar 97,4 juta jiwa. Artinya terjadi peningkatan yang amat signifikan dengan perkiraan pertumbuhan populasi sebesar 60 persen (Alex Hunter: 2007). Puncaknya adalah mencapai 106,9 juta jiwa pada tahun 1965 (SoP: 1964-1967).

2. Produksi dan Distribusi Pangan

Cadangan beras Indonesia terus mengalami defisit akibat ketimpangan dalam peyediaan produksi pangan dan konsumsi oleh penduduk. Kekurangan pembelian beras dalam negeri membuat pemerintah melakukan tindakan dengan melakukan impor beras (Van der eng.,1996: 187-188). Semenjak tahun 1959, Indonesia membutuhkan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Tabel 2. Impor Beras Indonesia Tahun 1958- 1964

No.	Tahun	Jumlah (Juta ton)
1.	1959	891
2.	1960	966
3.	1961	1.065
4.	1962	1.064
5.	1963	1.070
6.	1964	900

Setelah devisa negara berkurang, Indonesia melakukan usaha mencukupi pangan melalui produksi dalam negeri dengan melakukan pembelian padi dalam negeri dan terkait distribusi diutamakan untuk pegawai negeri, angkatan bersenjata, kepolisian baru setelah itu didistribuskan ke Toko Sandang Pangan atau Koperasi untuk dibagikan pada masyarakat.

Kekurangan produksi terus terjadi. Ditambah dengan pertengahan tahun 1960-an, antara tahun 1960-1965 dimana terjadi penurunan dalam pertumbuhan subsector tanaman pangan di Indonesia yang hanya tumbuh sebesar 1,2 % (Ben White& Peter Boomgard, 2016: 51). Sehingga tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang terus bertumbuh.

3. Bencana Alam

Salah satu bencana paling signifikan adalah kekeringan yang disebabkan oleh fenomena *El Niño* . William Quinn, dalam penelitiannya tahun 1978, mengungkapkan bahwa "77% bencana kekeringan bertepatan dengan kejadian El Niño yang terjadi di wilayah Pasifik tropis bagian Timur," yang berdampak luas pada ekologi dan hasil panen di Indonesia karena kekeringan (Cesar N. Caviedes, *El Niño in History* , 2001:137). Krisis semacam ini dikenal dalam historiografi sebagai "krisis subsistensi", yaitu situasi di mana kegagalan secara panen langsung mengancam kelangsungan hidup masyarakat agraris (Ben White dan Peter Boomgaard, 2016:5)

Situasi kekeringan yang terjadi pada awal dekade 1960-an mengganggu produksi pangan, terutama pada tahun 1963 hingga 1965. Di wilayah Yogyakarta, khususnya Gunung Kidul, bencana kekeringan disertai serangan hama menyebabkan gagal panen secara luas. Laporan Bupati Gunung Kidul pada 19 Januari 1964 menyebutkan bahwa "banyak petani menderita akibat bencana kekeringan yang melanda dan disertai serangan hama menyebabkan gagal panen di beberapa kecamatan" (Kedaulatan Rakjat, 20 Februari 1964).Gejala kekeringan bahkan telah muncul sejak 1960. Padahal, Yogyakarta adalah salah satu daerah sentra penghasil padi nasional dengan produksi mencapai 286.000 ton pada tahun 1962 (Kedaulatan Rakjat, 27 Desember 1962).

C. Bentuk dan Dinamika Masyarakat Sewaktu Krisis Pangan 1959 hingga 1965

Krisis pangan yang melanda Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) merupakan salah satu refleksi dari keterpaduan antara kebijakan ekonomi-politik nasional dan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai kebutuhan utama, ketersediaan pangan yang tidak merata telah menimbulkan keresahan sosial yang mendalam di kalangan masyarakat bawah. Ketika rakyat mengalami kelaparan dan kekurangan bahan makanan, negara justru sibuk menggaungkan revolusi dan stabilitas politik. Dalam perspektif sejarah sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Kuntowijoyo, fenomena semacam ini penting untuk dikaji karena menampilkan hubungan antara struktur kekuasaan dan penderitaan rakyat sehari-hari (Kuntowijoyo, 2003: 39–58).

Laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menunjukkan adanya kekhawatiran global terhadap bahaya kelaparan di Asia, termasuk Indonesia. Pada kunjungannya ke Indonesia tanggal 8 Desember 1960, Direktur Jenderal FAO, BR Sen, menegaskan bahwa kawasan Asia adalah wilayah dengan penderita kelaparan tertinggi di dunia. Dalam laporan majalah Yugoslavia yang dikutip oleh surat kabar *Bintang Timur* , dikatakan bahwa "semenjak Perang Dunia II berakhir, 75% penduduk dunia mengalami kelaparan… penduduk Asia paling menderita karena memiliki rata-rata kalori per kapita hanya 2.070 kalori" (Bintang Timur, 12 Januari 1963).

Sayangnya, laporan media mengenai kelaparan di Indonesia sulit ditemukan karena adanya pembedelan pers oleh pemerintah. Presiden Sukarno secara aktif membatasi peliputan media, terutama yang dianggap mengganggu jalannya revolusi. Meski demikian, fakta-fakta di lapangan tidak dapat ditutupi sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian Pierre van der Eng, rakyat Indonesia dibeberapa daerah memang mengalami kekurangan pangan sejak dekade 1950-an hingga awal 1960-an. Namun, isu ini tidak terlalu dimuat di media karena ketatnya kontrol terhadap pemberitaan (van der Eng, 2012: 1).

Berbeda dengan Van der eng, sebuah studi tentang dampak kekurangan pangan memberi sorotan antara lain gagal panen serta serangan hama pada tahun 1963 dan 1964 di daerah kecil Yogyakarta (White,2016: 239). Tepatnya di daerah Gunung Kidul, banyak rakyat miskin mengemis demi mendapatkan beras. Mereka juga berdemonstrasi kepada bupati setempat meminta pangan gratis. Kesulitan yang mereka alami menjadi perhatian beberapa lembaga sampai perhatian

dinas pemerintah sehingga mereka memberikan bantuan pangan gratis untuk mengurangi masalah beberapa daerah di Gunung Kidul tersebut. (White,2016: 40-241).

Disamping itu, reaksi terhadap krisis ini juga datang dari kalangan intelektual dan pelajar terutama daerah ibukota. Soe Hok Gie, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, secara lantang mengkritik kebijakan Sukarno. Gie juga mengkritik keras praktik manipulasi media oleh pemerintah. Ia menulis, "Kita dinina-bobokkan bahwa produksi padi naik.. Tetapi rakyat akan bertanya: Mengapa beras mahal?" (Soe Hok Gie, 1983:93). Gie menyamakan pers di masa Sukarno dengan *Domei* , media propaganda Jepang, dengan menyindir: "Apakah tugas pers seperti Domei… Lihat, Jepang kalah juga oleh berita-berita yang salah." Apa yang menjadi perhatian salah satu tokoh dibalik Demo Tritura itu adalah kesulitan yang terjadi saat terjadinya situasi sulit terutama terkait soal pangan yang mulai menjadi masalah yang patut diperhatikan.

Menjelang keruntuhan rezim Sukarno, keresahan sosial akibat krisis pangan memuncak disamping politik G30/S/PKI. Demonstrasi besar-besaran diadakan oleh mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 1 November 1965, terjadi protes di Jalan Majapahit, Jakarta, mempersoalkan harga beras yang melambung tinggi. Slogan seperti "PKI bubar = Beras Turun" mencerminkan hubungan antara konflik politik dan penderitaan ekonomi rakyat (ANRI, Arsip Foto Deppen RI, No. 41934). Gerakan mahasiswa kemudian menyatu dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang menggulirkan *Tritura* – tiga tuntutan rakyat – termasuk mendesak pihak berwajib untuk melakukan penurunan harga beras (Juliani, 2020: 2).

Dengan demikian, krisis pangan di era Demokrasi Terpimpin bukan hanya masalah kekurangan bahan pangan, tetapi juga cermin dari gagalnya negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Kontrol informasi, prioritas politik di atas kebutuhan dasar, serta minimalnya akses rakyat terhadap keadilan ekonomi terutama soal pangan. Krisis pangan ini menjadi bukti bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan ketidakstabilan didalam masyarakat. Untuk lebih memahami konteks situasi dan tindakan lain yang membuat kondisi dalam hal pemenuhan pangan menjadi faktor penyebab kesulitan maka penting untuk memahami jalannya operasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat itu, seperti dari opini yang lahir dari surat kabar berikut.

D. Potret Kehidupan Masyarakat Saat Situasi Krisis Pangan

Situasi krisis pangan yang melanda Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin menunjukkan kompleksitas permasalahan ekonomi dan sosial yang saling berkelindan. Kelangkaan bahan pokok, khususnya beras, menimbulkan antrean panjang di berbagai kota, seperti Jakarta dan Yogyakarta, sebagai bukti kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pada potret berikut merupakan satu contoh foto mengenai antrean beras di Tanjung Priok pada 18 November 1961 mencerminkan secara gamblang betapa beratnya Potret perjuangan masyarakat mendapatkan jatah beras.



Gambar 2. Antrean Beras di Tanjung Priok

Pemerintah memang berusaha mengatur distribusi melalui toko-toko dengan harga yang ditetapkan, namun jatah yang tersedia sangat terbatas sehingga tidak mencukupi seluruh kebutuhan rakyat. Antrean panjang dan keresahan masyarakat terekam dalam foto yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI (Ipphos, 1961).

Tak hanya media nasional, media asing juga menyoroti kondisi krisis ini. Dalam laporan surat kabar Belanda *Twentsch Dagblad Tubantia* tanggal 20 Februari 1962, disebutkan bahwa menurut pakar ekonomi Jakarta, kehidupan masyarakat kota sangat rentan dan kehidupan mereka sangat pas-pasan. Kenaikan harga beras yang ekstrim terjadi sejak Desember 1960, dimana harga beras kelas satu melonjak hingga 686%. Sementara itu, masyarakat beralih membeli beras kelas dua di pasar gelap dengan harga yang lebih murah namun kualitas lebih rendah. Fenomena ini memperjelas bahwa ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pangan telah menjadi masalah nasional (Van der Loeff, 1962).

Susan Abeyasekere mencatat bahwa selama tahun 1953–1955, harga beras di Jakarta naik lebih dari setengahnya dan memasuki awal tahun 1960-an kekacauan ekonomi semakin parah (Abeyasekere, 1987:186). Indeks biaya hidup dari Januari 1958 hingga Juli 1965 hingga meningkat sepuluh kali lipat. Situasi ini paling memukul para pegawai yang tetap bekerja, seperti Pegawai Negeri dan buruh harian, yang tidak mampu mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab nilai uang hasil kerja yang didapat semakin tidak berharga. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap beras sebagai pangan terus menurun drastis dari tahun ke tahun.

Kondisi ini diperburuk oleh adanya penyelewengan dalam distribusi beras oleh oknum spekulan. Surat kabar *Bintang Timur* edisi 9 Januari 1963 melaporkan kasus Ny. Hotimah yang menjual 15 ton beras seharga Rp22 per liter, melebihi harga resmi pemerintah sebesar Rp20. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp50.000. Penimbunan dan spekulasi serupa dilakukan oleh pedagang bernama Moh. Ali Iskandar yang menjual 21 karung beras injeksi dengan harga Rp55, jauh di atas harga normal Rp4,50 (Berita Indonesia, 8 Juni 1962). Spekulasi ini menyebabkan terganggunya pasokan beras pemerintah dan memicu keresahan sosial.

Pemerintah merespons dengan tindakan tegas. Menteri Distribusi Dr. Leimena meminta aparat negara seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Militer untuk mengadili para penimbun dan spekulan (Merdeka, 21 Desember 1961). Bahkan Presiden Sukarno secara pribadi mengecam keras pelaku penimbunan dan menyebutnya sebagai "pengacau ekonomi", sambil menegaskan bahwa peran ibu rumah tangga penting dalam melaporkan kondisi distribusi. Dalam pidatonya tahun 1954 berjudul *Berirama dengan Kodrat* , Sukarno menyatakan, “Alangkah janggalnya jikalau Indonesia itu dalam alam kemerdekaan masih juga bergantung dari luar-negeri dalam memenuhi kebutuhan makanan rakyat!” (Sukarno, 1964:130). Pernyataan ini mempertegas pentingnya kemandirian pangan nasional.

Di daerah Yogyakarta, ketimpangan distribusi juga sangat terasa. Surat kabar *Kedaulatan Rakjat* edisi 27 September 1961 mengisahkan nasib pegawai swasta yang tidak mendapatkan jatah beras, sementara pegawai negeri diberi prioritas. Mereka dibaratkan sebagai anak tiri dalam keluarga, yang duduk bersama di meja makan tetapi hanya bisa menggigit jari. Kebijakan yang berat sebelah ini mengundang kritik keras dari masyarakat, karena tidak adil terhadap warga negara yang bukan bagian dari birokrasi negara. Bahkan masyarakat umum nonpegawai sama sekali tidak mendapat perhatian dalam pendistribusian pangan tersebut. Penyelewengan juga terjadi di daerah lain seperti Yogyakarta pada bulan Maret 1962, di mana pihak kepolisian menyita 1.230 ton beras dan 400 ton padi yang ditimbun oleh oknum untuk dijual dengan harga tinggi (Kedaulatan Rakjat, 10 Maret 1962).

Tindakan ini memicu kemarahan Sukarno yang bahkan mengancam akan menjatuhkan hukuman mati kepada para pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa isu pangan sudah menjadi persoalan serius yang menyangkut stabilitas stabilitas nasional. Sebagai respon awal, Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 yang berisi ancaman terhadap para "pengacau ekonomi" (Penpres No. 5/1959). Ini menjadi bentuk awal intervensi negara secara tegas terhadap gejolak ekonomi.

Disamping itu, pemerintah memberikan respon untuk menanggapi krisis pangan adalah melalui proyek buku *Mustikarasa* yang disusun sejak tahun 1960 dan diterbitkan pada tahun 1967. Dalam pengantar buku tersebut dinyatakan bahwa: "..Pemerintah telah mengambil suatu keputusan jang radikal revolusioner, jaitu merobah menu rakjat dari beras melulu, mendjadi beras, djagung, umbi²an, dll."(Mustikarasa, 1967 :xxiv). Dalam upaya tersebut, tindakan yang nyata yang dilakukan pemerintah terealisasi dalam beberapa program. Misalnya pada program distribusi beras terhadap pegawai negeri. Melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963, pendistribusian beras kepada Pegawai juga diubah menjadi 25% jagung dan 75% beras sebagai upaya penghematan stok nasional (Perpres No. 10/1963). Namun kebijakan ini tidak berjalan optimal karena terhambatnya sistem distribusi.

Meskipun proyek *Mustikarasa* lebih menekankan pada pengolahan bahan pangan, buku ini mencerminkan sikap pemerintah dalam upaya mengatasi kelangkaan beras(JJ Rizal, 2016: Pengantar Mustikarasa terbitan Komunitas Bambu). Dalam memo pengantar buku ini dituliskan bahwa buku ini dimaksudkan sebagai "penundjuk djalan bagi Rakjat Indonesia... bagaimana bahan²makanan jang terdapat didaerahnja itu dapat diolah mendjadi makanan lezat jang berfaedah" (Mustikarasa, 1967 :xxx). Bahkan dalam jamuan makan pejabat negara, jagung mulai menggantikan beras. Menteri Kesehatan Satrio menceritakan bahwa dalam jamuan makan dengan Sukarno pada 12 Juli 1964, "tidak sebutir beras pun disajikan, melainkan hanya makanan dari jagung" (Fadhly Rahman, 2016:269). Ini menggambarkan strategi simbolik pemerintah dalam mengampanyekan perubahan pola konsumsi ditengah situasi kisruh politik dan ekonomi yang terjadi semasa periode Demokrasi Terpimpin.

Penelitian ini menegaskan bahwa krisis pangan selama era Demokrasi Terpimpin bukan hanya cerminan kegagalan distribusi bahan pokok, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktural negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat akibat prioritas politik yang mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pemerintah sibuk menggaungkan revolusi dan retorika berdikari, rakyat justru menghadapi antrean panjang dan kelaparan, sebagaimana dicatat oleh Soe Hok Gie: *"Kita dinina-bobokkan bahwa produksi padi naik... tetapi rakyat akan bertanya: mengapa beras mahal?"* (Gie, 1983:93). Situasi ini diperparah oleh kontrol ketat terhadap media, spekulasi oleh pedagang, serta distribusi beras yang timpang dan diskriminatif, terutama di kalangan luar birokrasi. Sementara kebijakan simbolik seperti proyek *Mustikarasa* dan pidato-pidato Sukarno yang mengedepankan kemandirian pangan menunjukkan keinginan untuk mengubah pola konsumsi, namun realisasi di lapangan sangat terbatas karena tidak dibarengi reformasi sistem distribusi dan produksi yang memadai. Dalam hasil penelitian ini, masih terdapat keterbatasan pada kurangnya data primer dari kalangan masyarakat bawah, dominasi narasi kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, serta minimnya statistik resmi yang dapat mengukur dampak krisis secara kuantitatif, sehingga analisis lebih bersandar pada sumber-sumber media dan kesaksian elite.

KESIMPULAN

Krisis pangan pada periode Demokrasi terpimpin terjadi oleh beberapa faktor. Berawal dari inflasi ekonomi membuat semua aspek ekonomi menjadi berpengaruh. Selain itu faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, produksi dan distribusi yang kecau, serta bencana alam juga menjadi faktor utama. Saat setelah memasuki Demokrasi Terpimpin arah kebijakan ekonomi dalam prosesnya berjalan beriringan keputusan politik Sukarno. Sementara kebutuhan ekonomi yaitu pemenuhan pangan tidak berjalan dengan baik. Di lain sisi terjadinya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan angka produksi beras mengharuskan pemerintah segera mengambil keputusan. Ditambah kasus distribusi beras yang banyak menciptakan tindakan tidak terpuji seperti penyelewengan. Tiga tahun awal pasca pemerintahan Sukarno era ini, inflasi meninggi yang menimbulkan spekulan dan *pencoleng* beras yang membuat keaadaan pasokan beras menjadi terganggu.

Respon oleh pemerintah berhasil mengatasi tindakan para pengacau distribusi beras dengan berbagai cara. Fenomena krisis pangan membuat kebutuhan beras harus dicari alternatif oleh sebab itu, disaat bersamaan pemerintah menganjurkan untuk melakukan diversifikasi pangan serta menerbitkan *kookboek* untuk mengolah bahan pangan lain selain beras. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah berikutnya yaitu Soeharto mengutamakan kebijakan Revolusi Hijau untuk memperbaiki krisis yang ditinggalkan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno. Dalam tinjauan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa kebutuhan pangan memiliki peranan penting dalam memengaruhi stabilitas politik, ekonomi dan sosial secara menyeluruh sehingga perlu menjadi perhatian.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang periodisasi pemerintahan Sukarno dalam segala aspek kebijakannya agar lebih bisa meneliti secara objektif. Mengingat banyak aspek dalam kehidupan yang kadang luput dari narasi sejarah penting untuk mengungkap kembali tabir yang tertutupi oleh arus perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Syaekhu Rakhman, A. H. (2022). *Kebijakan Ekonomi Sukarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jurnal Pendidikan Sejarah, 5, 6.

Alex Hunter, Chapter 6: “Notes on Indonesian population”, Glassburner, B. (ed.). (2007). *The economy of Indonesia: selected readings*. Ithaca, London: Cornell University Press, 1971.

Andi Suwirta, *“Pers: Dari "Kebebasan" ke "Terpimpin"* , Andi Suwirta dan Prof. Dr. Gusti Asnan (ed.), *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid VII Pasca Revolusi*. (2012). Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Arwendi, P. D. A., & Widodo, A. A. (2024). *Soe Hok Gie: Aktivis Demonstrasi Pengkritik Tirani.* Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11 (4), hlm: 1688.

Ben White dan Peter Boomgaard. (2016). *Dari Krisis ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi selama Abad ke-20.* Gadjah Mada University Press.

Cakranegara, J. J. S. (2022). Diversitas Pangan Pokok Dalam Sejarah Kebijakan Pangan Di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *6*(1), 17–40. https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.283.

Hermawan, H., & Andrianyta, H. (2023). Respons Kebijakan Terhadap Potensi Krisis Pangan Global. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(4), 400-406.

Kelley, A.C. & Schmidt, R. M. (2001). Economic and Demographic Change: A Synthesis Models, Findings and Perspectives. N. Birdsall, C. Kelley and S.W Sinding (eds) *Population Matters: Demographic Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World*. Oxford: Oxford University Press, 67-105.

Kuntowijoyo (2003*). Metodologi Sejarah, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Tiara Wacana).

Mehraban, N., & Ickowitz, A. (2021). Dietary diversity of rural Indonesian households declines over time with agricultural production diversity even as incomes rise. *Global Food Security*, *28*. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100502

Mostafizur, R. M., Asma, K. M., Islam, M., Saijo, T., & Kotani, K. (2025). Does future design induce people to make a persistent change to sustainable food consumption? *Food Policy*, *135*. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102916

Nawiyanto, N. (2017). *Politik Pangan dan Ketahanan Pangan pada Masa Orde Lama Indonesia (1945-1965)*. Lembaran Sejarah , 10 (1), 65-73.

Nurhidayat, W., Kurnia, P. S., Andayasari, M. P., & Ribawati, E. (2024). *Krisis Ekonomi dan Kondisi Masyarakat Indonesia Tahun 1965-1966.* Sindoro: Cendikia Pendidikan.

Pangestu, B. N. (2023). *Sukarno: Dari Krisis, Perjamuan, Hingga Kebijakan Pangan Sukarno 1942-1967.* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Rahman, F. (2018). Kuliner sebagai Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Sejarah*, *2*(1), 43–63. https://doi.org/10.26639/js.v%vi%i.118

Ricklefs, MC. (2003) *Sejarah Indonesia Modern 2001- 2004*. Jakarta : Serambi Ilmu.

Rizaldi, B. A., Sianipar, J. F., & Anwar, S. (2023). *Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat.* Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(4), 2856-2857.

Roy, D., Gillespie, S. A., & Hossain, M. S. (2025). Revisiting the drought-food insecurity nexus: a social-ecological systems perspective. In *Global Food Security* (Vol. 46). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2025.100874

Tim Komunitas Bambu (ed). 2020. Mustikarasa: Resep Masakan Indonesia Warisan Sukarno. Depok: Komunitas Bambu.

Yusuf Budi Prasetya Santosa, H. I. (2023, Mei 1). *Sejarah Perkembangan Makanan Indonesia Dari Abad Ke 10 Hingga Masa Pendudukan Jepang*. Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 9, 116. Doi:: 10.36424/Jpsb.V9i1.36.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.